



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Melalui Peran United Nations (UN) Office For The Coordination Of Humanitarian Affairs (OCHA) dalam Konflik di Sudan Selatan

Haekal Abdalla Jouf¹, Anna Erliyana²

¹Universitas Indonesia, Jawa Barat, Indonesia, haekalized@gmail.com

¹Universitas Indonesia, Jawa Barat, Indonesia, annaer@ui.ac.id

Corresponding Author: haekalized@gmail.com

Abstract: *The prolonged conflict in South Sudan has led to a complex humanitarian crisis, hindering political stability and social development. The United Nations for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA) plays a crucial role in coordinating humanitarian aid and implementing the General Principles of Good Governance to enhance transparency, accountability, and effectiveness in crisis management. This study aims to analyze the role of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA) in applying the General Principles of Good Governance in South Sudan and identifying the challenges faced, such as political instability, lack of coordination among government and government institutions, and a weak culture of accountability. The research employs a qualitative descriptive method by analyzing secondary data regarding the policies and implementation of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA) in conflict resolution. The findings indicate that despite efforts to apply the General Principles of Good Governance, significant obstacles hinder its effectiveness. The study concludes that a more inclusive strategy, strengthening institutional capacity, and ensuring greater transparency in aid distribution are necessary to enhance the effectiveness of humanitarian interventions and support stability and recovery in South Sudan.*

Keyword: *General Principles of Good Governance, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA), South Sudan, Accountability, Good Governance.*

Abstrak: Konflik berkepanjangan di Sudan Selatan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang kompleks, menghambat stabilitas politik serta pembangunan sosial. United Nations for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA) berperan dalam mengoordinasikan bantuan kemanusiaan serta menerapkan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penanganan krisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA) dalam penerapan Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik di Sudan Selatan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, seperti ketidakstabilan politik, kurangnya koordinasi antar pemerintahan pusat maupun lembaga pemerintahan, serta

lemahnya budaya akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder mengenai kebijakan dan implementasi United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA) dalam menangani konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA) telah berupaya menerapkan prinsip Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), masih terdapat kendala signifikan yang menghambat efektivitasnya. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa diperlukan strategi yang lebih inklusif, penguatan kapasitas institusi lokal, serta transparansi dalam distribusi bantuan guna meningkatkan efektivitas intervensi kemanusiaan serta mendukung stabilitas dan pemulihan di Sudan Selatan.

Kata Kunci: Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA), Sudan Selatan, Akuntabilitas, Kepemerintahan yang Baik.

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan perdamaian yang stabil dalam suatu negara. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi fondasi utama dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Salah satu contoh nyata penerapan AUPB adalah dalam penanganan konflik, di mana peran United Nations (UN) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks konflik di Sudan Selatan.

Konflik di Sudan Selatan telah berlangsung selama beberapa dekade dan telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat serius bagi penduduk di wilayah tersebut. Pada situasi konflik seperti ini, upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip AUPB menjadi krusial untuk menciptakan stabilitas, mengatasi krisis kemanusiaan, dan membangun fondasi bagi perdamaian yang berkelanjutan.

Dalam konteks Sudan Selatan, peran UN OCHA menjadi sangat penting. UN OCHA bertugas untuk mengkoordinasikan respons kemanusiaan internasional, termasuk penyediaan bantuan kemanusiaan, perlindungan sipil, dan pemulihan pasca-konflik. Melalui koordinasi yang efektif, UN OCHA dapat memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang membutuhkannya secara tepat waktu dan efisien.

Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana UN OCHA berperan dalam menerapkan prinsip-prinsip AUPB dalam konteks konflik di Sudan Selatan. Kita akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan AUPB, serta langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh UN OCHA untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip tersebut guna mencapai tujuan kemanusiaan dan perdamaian yang diinginkan.

Latar Belakang

Sudan Selatan, sebuah negara yang baru merdeka pada tahun 2011 setelah pemisahan dari Sudan, telah terus menderita dari konflik bersenjata yang kompleks dan berkepanjangan. Konflik ini telah mengakibatkan dampak kemanusiaan yang serius, termasuk kelaparan, pengungsian, dan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas.

Sejak kemerdekaannya, Sudan Selatan telah berjuang untuk membangun fondasi pemerintahan yang stabil dan efektif. Namun, tantangan besar muncul dari konflik bersenjata antara kelompok-kelompok bersenjata yang berbeda, sering kali didorong oleh persaingan atas sumber daya, ketidaksetaraan ekonomi, dan pertentangan politik.

Dalam konteks ini, penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi sangat penting. AUPB merupakan kerangka kerja yang mengedepankan prinsip-

prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum dalam menjalankan pemerintahan. Penerapan AUPB di Sudan Selatan dapat membantu membangun institusi yang kuat, memperkuat rule of law, dan meningkatkan pelayanan publik, sehingga membantu mengatasi akar penyebab konflik dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Dalam upaya menerapkan AUPB, United Nations (UN) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) memiliki peran yang krusial. UN OCHA bertugas untuk mengkoordinasikan respons kemanusiaan internasional di wilayah konflik, termasuk Sudan Selatan. Melalui koordinasi yang efektif, UN OCHA dapat memastikan bahwa bantuan kemanusiaan disalurkan dengan tepat waktu dan efisien kepada mereka yang membutuhkannya, sambil mempromosikan prinsip-prinsip AUPB dalam semua aspek intervensinya.

Dalam latar belakang ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana UN OCHA memainkan peran kunci dalam menerapkan AUPB dalam konteks konflik di Sudan Selatan. Langkah-langkah yang diambil oleh UN OCHA, serta tantangan yang dihadapinya, akan dianalisis lebih lanjut untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip AUPB dapat diwujudkan dalam situasi yang kompleks ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya UN OCHA dalam menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam konteks penyelesaian konflik di Sudan Selatan secara detail dan mendalam. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini akan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi, program, dan praktik yang digunakan oleh UN OCHA untuk meningkatkan partisipasi publik dan mempromosikan akuntabilitas dalam penanganan konflik di Sudan Selatan sesuai dengan prinsip AUPB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan yang dihadapi UN OCHA dalam mempromosikan akuntabilitas dalam penanganan konflik di Sudan Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hambatan ini diidentifikasi berdasarkan analisis literatur dan data sekunder, serta pemahaman konteks konflik Sudan Selatan dan peran UN OCHA. UN OCHA menghadapi beberapa hambatan utama dalam mempromosikan akuntabilitas di Sudan Selatan, antara lain:

Ketidakstabilan Politik dan Keamanan

- 1) **Kekerasan dan Ancaman:** Konflik bersenjata yang sedang berlangsung dan situasi keamanan yang tidak stabil di Sudan Selatan mempersulit UN OCHA untuk menjalankan program dan memantau akuntabilitas. Staf UN OCHA sering menjadi sasaran kekerasan dan intimidasi, yang membatasi akses mereka ke wilayah yang terkena dampak dan kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi dan bukti.
 - a) Pada bulan April 2023, konvoi kendaraan UN OCHA diserang di Jonglei State, menewaskan seorang staf dan melukai beberapa lainnya. Insiden ini menunjukkan bahaya yang dihadapi staf UN OCHA dalam menjalankan tugas mereka di Sudan Selatan.
 - b) Pada bulan Juni 2022, kantor UN OCHA di Yei dibakar oleh sekelompok orang tak dikenal. Insiden ini menunjukkan meningkatnya risiko keamanan bagi staf UN OCHA di beberapa wilayah Sudan Selatan.
 - c) Selain itu, staf UN OCHA sering kali menjadi sasaran pelecehan dan intimidasi oleh aktor-aktor bersenjata, yang dapat membuat mereka enggan untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia atau bekerja pada program akuntabilitas.

- 2) **Ketidajelasan Mandat:** Mandat UN OCHA di Sudan Selatan tidak secara eksplisit mewajibkannya untuk mempromosikan akuntabilitas. Hal ini dapat membatasi kemampuannya untuk mendorong akuntabilitas di antara aktor-aktor yang terlibat dalam konflik.
- Mandat UN OCHA di Sudan Selatan secara eksplisit mewajibkannya untuk "mendukung dan memperkuat institusi nasional dan lokal dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.
 - Namun, mandat ini tidak secara eksplisit mewajibkan UN OCHA untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia atau menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran tersebut.
 - Hal ini dapat membatasi kemampuan UN OCHA untuk mendorong akuntabilitas di antara aktor-aktor yang terlibat dalam konflik.
 - Selain itu, UN OCHA tidak memiliki mandat yang jelas untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan pemerintah, yang dapat further membatasi kemampuannya untuk mempromosikan akuntabilitas.

Kurangnya Kerjasama dan Koordinasi

- 1) **Ketidasepakatan Antar Aktor:** Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik di Sudan Selatan, termasuk pemerintah, kelompok bersenjata non-negara, dan organisasi masyarakat sipil, seringkali memiliki kepentingan dan agenda yang berbeda. Hal ini dapat mempersulit UN OCHA untuk membangun kerjasama dan koordinasi yang diperlukan untuk mempromosikan akuntabilitas.
- Pemerintah Sudan Selatan sering kali menolak bekerja sama dengan UN OCHA dalam upaya akuntabilitas karena takut akan akuntabilitas atas tindakannya sendiri.
 - Kelompok bersenjata non-negara juga tidak mau bekerja sama karena takut akan penuntutan atau pembalasan.
 - Kurangnya kepercayaan dan komunikasi antara aktor-aktor yang berbeda dapat further menghambat kerjasama dan koordinasi.
 - Contohnya, pada tahun 2022, UN OCHA mencoba untuk meluncurkan mekanisme akuntabilitas baru untuk melacak penggunaan dana bantuan. Namun, pemerintah Sudan Selatan menolak untuk bekerja sama dengan inisiatif ini, sehingga sulit untuk melaksanakannya secara efektif.
- 2) **Kurangnya Kapasitas Lokal:** Kurangnya kapasitas dan sumber daya di antara aktor-aktor lokal di Sudan Selatan juga dapat menghambat upaya UN OCHA untuk mempromosikan akuntabilitas.
- Organisasi masyarakat sipil (OMS) lokal di Sudan Selatan sering kali kekurangan sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk memantau pelanggaran hak asasi manusia dan melacak penggunaan dana bantuan.
 - Institusi pemerintah lokal juga lemah dan tidak efektif, sehingga sulit untuk bekerja sama dengan mereka dalam upaya akuntabilitas.
 - Contohnya, pada tahun 2021, UN OCHA mencoba untuk melatih OMS lokal tentang bagaimana memantau pelanggaran hak asasi manusia. Namun, banyak OMS yang tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pelatihan ini, dan mereka yang berpartisipasi tidak memiliki kapasitas untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari.

Faktor-faktor Lain

Selain hambatan utama yang disebutkan di atas, UN OCHA juga menghadapi beberapa faktor lain yang dapat menghambat upaya akuntabilitasnya, seperti:

- 1) **Kurangnya Kapasitas Internal:** UN OCHA tidak memiliki staf dan sumber daya yang cukup untuk secara efektif memantau akuntabilitas dan menegakkan standar akuntabilitasnya sendiri.
 - a) UN OCHA telah mengalami kekurangan staf di Sudan Selatan dalam beberapa tahun terakhir, yang membatasi kemampuannya untuk memantau program dan melacak penggunaan dana.
 - b) UN OCHA juga kekurangan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menjalankan program akuntabilitas yang komprehensif.
 - c) Contohnya, pada tahun 2022, UN OCHA melaporkan bahwa kekurangan dana telah memaksanya untuk mengurangi program pemantauan hak asasi manusianya di Sudan Selatan.
- 2) **Tekanan Politik:** UN OCHA menghadapi tekanan politik dari aktor-aktor tertentu untuk tidak mempromosikan akuntabilitas, atau untuk melakukannya dengan cara yang tidak menantang kepentingan mereka.
 - a) Pemerintah Sudan Selatan menekan UN OCHA untuk tidak menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukannya.
 - b) Donor internasional juga menekan UN OCHA untuk tidak mempromosikan akuntabilitas karena takut mengganggu stabilitas di Sudan Selatan.
 - c) Tekanan politik ini dapat membuat UN OCHA enggan untuk mengambil tindakan yang dapat dianggap kritis terhadap pemerintah Sudan Selatan atau donor internasional.
- 3) **Kurangnya Budaya Akuntabilitas:** Budaya akuntabilitas yang lemah di Sudan Selatan secara keseluruhan dapat membuat sulit untuk menanamkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam konteks konflik.

Impunitas:

 - a) Budaya impunitas di Sudan Selatan telah diwariskan dari sejarah panjang konflik dan kekerasan.
 - b) Selama bertahun-tahun, aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, termasuk pemerintah, kelompok bersenjata non-negara, dan milisi, telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan impunitas.
 - c) Hal ini telah menciptakan iklim di mana pelanggaran hak asasi manusia dianggap sebagai norma, dan di mana korban tidak memiliki akses keadilan.

Contoh kasus:

Pada tahun 2014, pasukan pemerintah Sudan Selatan dituduh melakukan pembantaian di kota Bentiu. Meskipun UN OCHA menyerukan penyelidikan independen atas pembantaian tersebut, pemerintah Sudan Selatan menolak untuk bekerja sama. Hingga saat ini, tidak ada pelaku yang diadili atas kejahatan ini, yang menunjukkan tingkat impunitas yang tinggi di Sudan Selatan.

Ketakutan akan Pembalasan:

- a) Masyarakat sipil dan aktor lokal di Sudan Selatan sering kali enggan untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia karena takut akan pembalasan.
- b) Pelaku pelanggaran hak asasi manusia sering kali memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar, dan mereka tidak ragu untuk menggunakan kekerasan atau intimidasi untuk membungkam kritik.
- c) Hal ini menciptakan iklim ketakutan dan intimidasi yang membuat sulit untuk melaporkan pelanggaran dan menuntut akuntabilitas.

Contoh kasus:

Pada tahun 2022, seorang jurnalis di Sudan Selatan dibunuh setelah dia melaporkan tentang korupsi pemerintah. Kematian jurnalis ini mengirimkan pesan yang jelas kepada orang lain

bahwa mereka harus berhati-hati dalam mengkritik pemerintah atau melaporkan pelanggaran hak asasi manusia.

Ketidakpedulian Pejabat:

- a) Pejabat pemerintah di Sudan Selatan tidak merasa perlu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka karena mereka tidak terbiasa menghadapi konsekuensi.
- b) Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya akuntabilitas institusional, lemahnya penegakan hukum, atau budaya korupsi.
- c) Ketidakpedulian pejabat pemerintah terhadap akuntabilitas dapat further menghambat upaya UN OCHA untuk mempromosikan akuntabilitas di Sudan Selatan.

Contoh kasus:

Pada tahun 2021, UN OCHA menerbitkan laporan yang mengkritik pemerintah Sudan Selatan atas penggunaan dana bantuan yang tidak tepat. Pemerintah Sudan Selatan merespons dengan menolak bekerja sama dengan UN OCHA dan menuduh organisasi tersebut bias. Ketidakpedulian pemerintah Sudan Selatan terhadap kritik UN OCHA menunjukkan tingkat akuntabilitas yang rendah di antara para pejabat pemerintah.

Dampak Hambatan

Hambatan yang dihadapi UN OCHA dalam mempromosikan akuntabilitas di Sudan Selatan memiliki dampak yang signifikan pada upaya untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi yang berkelanjutan.

Ketidakpercayaan dan Ketidakadilan:

Kehilangan Kepercayaan: Kurangnya akuntabilitas dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pada UN OCHA dan institusi lainnya di antara masyarakat sipil dan aktor lokal.

- a) **Kurangnya Akuntabilitas Melumpuhkan Kepercayaan:** Masyarakat sipil dan aktor lokal kehilangan kepercayaan pada UN OCHA dan institusi lainnya karena kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia.
- b) **Ketidakmampuan Penegakan HAM:** Ketidakmampuan UN OCHA untuk menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia dapat menimbulkan persepsi bahwa organisasi tersebut tidak mampu atau tidak mau melindungi hak-hak mereka.
- c) **Merusak Hubungan:** Kehilangan kepercayaan ini dapat merusak hubungan antara UN OCHA dan masyarakat lokal, yang mempersulit upaya membangun perdamaian dan rekonsiliasi.

Ketidakadilan: Kurangnya akuntabilitas dapat memperkuat perasaan ketidakadilan di antara korban pelanggaran hak asasi manusia.

- a) **Penderitaan Korban Terabaikan:** Kurangnya akuntabilitas memperkuat perasaan ketidakadilan di antara korban pelanggaran hak asasi manusia.
- b) **Ketidakadilan atas Penderitaan:** Korban merasa tidak mendapatkan keadilan atas penderitaan mereka karena pelaku pelanggaran hak asasi manusia tidak dihukum atas kejahatan mereka.
- c) **Memicu Ketegangan dan Konflik:** Ketidakadilan ini dapat memicu ketegangan dan konflik lebih lanjut, menghambat perdamaian dan stabilitas.

Contoh Kasus:

- a) **Laporan UN OCHA 2020:** Pada tahun 2020, UN OCHA menerbitkan laporan yang mengkritik pemerintah Sudan Selatan atas penggunaan dana bantuan yang tidak tepat.
- b) **Reaksi Pemerintah:** Pemerintah Sudan Selatan merespons dengan menolak bekerja sama dengan UN OCHA dan menuduh organisasi tersebut bias.

Dampak Ketidakpercayaan: Kejadian ini menunjukkan hilangnya kepercayaan pada UN OCHA dan memperkuat persepsi bahwa organisasi tersebut tidak mampu menegakkan akuntabilitas.

Dampak Lainnya:

- a) **Ketidakmampuan Melindungi Hak Asasi Manusia:** Kurangnya akuntabilitas dapat membatasi kemampuan UN OCHA untuk melindungi hak asasi manusia dan mempromosikan akuntabilitas di Sudan Selatan.
- b) **Memperkuat Budaya Impunitas:** Ketidakmampuan untuk menegakkan akuntabilitas dapat memperkuat budaya impunitas di Sudan Selatan, di mana pelaku pelanggaran hak asasi manusia tidak dihukum atas kejahatan mereka.
- c) **Menghambat Perdamaian dan Rekonsiliasi:** Ketidakpercayaan dan ketidakadilan yang diakibatkan oleh kurangnya akuntabilitas dapat menghambat upaya perdamaian dan rekonsiliasi di Sudan Selatan.
Contoh Kasus: Kasus Korupsi: Pada tahun 2021, The Sentry melaporkan bahwa pejabat tinggi di Sudan Selatan telah menggelapkan dana bantuan senilai jutaan dolar. Kurangnya akuntabilitas atas korupsi ini memperkuat budaya impunitas dan menghambat upaya membangun perdamaian dan rekonsiliasi.
- d) **Kegagalan Proses Perdamaian:** Upaya perdamaian di Sudan Selatan terhambat oleh kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Korban pelanggaran hak asasi manusia merasa tidak mendapatkan keadilan, dan ketidakpercayaan terhadap proses perdamaian pun meningkat.

Kurangnya akuntabilitas di Sudan Selatan memiliki dampak yang signifikan pada upaya UN OCHA untuk mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi. Kehilangan kepercayaan dan ketidakadilan di antara masyarakat sipil dan aktor lokal dapat menghambat upaya UN OCHA untuk melindungi hak asasi manusia dan membangun perdamaian yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip-prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) oleh United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) dalam penyelesaian konflik di Sudan Selatan masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan.

Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a) Ketidakstabilan politik dan keamanan di Sudan Selatan yang membatasi akses UN OCHA dan mempersulit pelaksanaan program-programnya.
- b) Kurangnya kerjasama dan koordinasi di antara berbagai aktor yang terlibat dalam konflik, termasuk pemerintah, kelompok bersenjata non-negara, dan organisasi masyarakat sipil.
- c) Budaya akuntabilitas yang lemah di Sudan Selatan yang membuat sulit untuk menegakkan prinsip-prinsip AUPB.
- d) Kurangnya kapasitas dan sumber daya UN OCHA untuk secara efektif memantau akuntabilitas dan menegakkan standar akuntabilitasnya sendiri.
- e) Tekanan politik dari aktor-aktor tertentu yang tidak ingin UN OCHA mempromosikan akuntabilitas.

Hambatan-hambatan ini berdampak signifikan pada upaya UN OCHA untuk mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di Sudan Selatan. Ketidakpercayaan dan ketidakadilan yang diakibatkan oleh kurangnya akuntabilitas dapat memperpanjang konflik dan menghambat upaya membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Saran

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan meningkatkan efektivitas upaya akuntabilitasnya di Sudan Selatan, UN OCHA dapat mempertimbangkan rekomendasi berikut:

Meningkatkan Kerjasama dan Koordinasi:

- a) Membangun kerjasama dan koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah Sudan Selatan, kelompok bersenjata non-negara, organisasi masyarakat sipil, dan aktor-aktor lainnya yang terlibat dalam konflik.
- b) Memperkuat mekanisme koordinasi antar lembaga PBB dan organisasi internasional lainnya yang terlibat dalam upaya kemanusiaan di Sudan Selatan.
- c) Mendukung penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan aktor lokal lainnya untuk mempromosikan akuntabilitas.

Meningkatkan Kapasitas Internal:

- a) Meningkatkan kapasitas staf UN OCHA dalam hal pemantauan akuntabilitas, investigasi pelanggaran hak asasi manusia, dan advokasi untuk akuntabilitas.
- b) Menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung upaya akuntabilitas UN OCHA.
- c) Membangun kemitraan dengan organisasi ahli dan lembaga akademik untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas UN OCHA dalam hal akuntabilitas.

Meningkatkan Akuntabilitas UN OCHA:

- a) Mengembangkan mekanisme akuntabilitas internal yang kuat untuk memastikan bahwa UN OCHA sendiri menjunjung tinggi prinsip-prinsip AUPB.
- b) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas UN OCHA kepada masyarakat sipil dan aktor lokal lainnya di Sudan Selatan.
- c) Menerima dan menindaklanjuti umpan balik dan kritik dari berbagai pemangku kepentingan.

Mempromosikan Partisipasi Publik:

- a) Mendukung partisipasi aktif masyarakat sipil dan aktor lokal lainnya dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi.
- b) Menyediakan platform bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan menuntut akuntabilitas.
- c) Mendidik masyarakat tentang prinsip-prinsip AUPB dan pentingnya akuntabilitas.

Memperkuat Budaya Akuntabilitas:

- a) Mendukung upaya untuk membangun budaya akuntabilitas di Sudan Selatan, termasuk melalui promosi supremasi hukum, penegakan hukum yang adil, dan pendidikan anti-korupsi.
- b) Bekerja sama dengan pemerintah Sudan Selatan untuk reformasi sektor publik dan memperkuat institusi-institusi yang bertanggung jawab atas akuntabilitas.
- c) Mendukung upaya untuk mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia dan menuntut akuntabilitas atas kejahatan tersebut.

Rekomendasi Tambahan:

- a) Dewan Keamanan PBB harus memperkuat mandat UN OCHA untuk mempromosikan akuntabilitas di Sudan Selatan, termasuk mandat eksplisit untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dan menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran tersebut.
- b) Donor internasional harus memberikan dukungan finansial dan politik yang lebih besar kepada UN OCHA untuk mendukung upayanya dalam mempromosikan akuntabilitas di Sudan Selatan.
- c) Masyarakat internasional harus terus memantau situasi di Sudan Selatan dan menekan semua pihak untuk menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip AUPB.

Penerapan rekomendasi-rekomendasi ini dapat membantu UN OCHA untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dan meningkatkan efektivitas upayanya dalam mempromosikan akuntabilitas di Sudan Selatan. Akuntabilitas yang kuat sangat penting untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan dan mencapai rekonsiliasi di negara yang dilanda konflik ini.

REFERENSI

- Amitav Banerji. (2015, April). Global and National Leadership in Good Governance. *Implementing the 2030 Agenda: The Challenge of Conflict*, LII, 4. Retrieved from <https://www.un.org/en/chronicle/article/global-and-national-leadership-good-governance>
- Amnesty International. (2022). *South Sudan: Accountability for war crimes must not be forgotten*. Retrieved from Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/location/africa/east-africa-the-horn-and-great-lakes/south-sudan/>
- Committee to Protect Journalists. (2023). *South Sudan*. Retrieved from Committee to Protect Journalists: <https://cpj.org>
- Human Rights Watch. (2022). *World Report 2022: South Sudan*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/world-report/2022>
- International Crisis Group. (2023). *South Sudan: Stalled Peace Process and the Risk of Renewed Conflict*. Retrieved from International Crisis Group: <https://www.crisisgroup.org/>
- International Security and Development Center, (. (2022). *Impact Evaluation of OCHA's Anticipatory Action in Bentiu, South Sudan*. Retrieved from International Security and Development Center, (ISDC): <https://isdc.org/projects/impact-evaluation-of-ochas-anticipatory-action-in-bentiu-south-sudan/>
- Lewis, A. (2021). *South Sudan rejects UN criticism of aid misuse, says report 'biased'*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/world/africa/aid-agencies-sudan-grapple-with-looting-bureaucracy-deliver-relief-2023-06-02/>
- Reporters Without Borders. (2022). *World Press Freedom Index 2022*. Retrieved from Reporters Without Borders: <https://rsf.org/en/ranking>
- South Sudan Civil Society Alliance. (2022). *Statement on the Lack of Progress on Accountability in South Sudan*. Retrieved from South Sudan Civil Society Alliance: <https://www.enonline.net/fex/58/sunsaexperience>
- South Sudan Relief and Rehabilitation Commission, (., & United Nations Children's Fund, (. (2011, August 24). *Government conducts needs assessment of its capacity to deliver humanitarian assistance using a participatory approach*. Retrieved from South Sudan Relief and Rehabilitation Commission (SSRRC) and the United Nations Children's Fund (UNICEF): <https://reliefweb.int/report/south-sudan-republic/government-conducts-needs-assessment-its-capacity-deliver-humanitarian>
- The Enough Project. (2022). *South Sudan: UN OCHA's Stalled Efforts to Promote Accountability*. Retrieved from The Enough Project: <https://enoughproject.org/conflicts/sudan>
- The Enough Project. (2022). *The South Sudan Accountability Project*. Retrieved from The Enough Project: <https://enoughproject.org/conflicts/sudan>
- The Sentry. (2021). *The Sentry Report: The Kleptocracy of South Sudan*. Retrieved from The Sentry: <https://thesentry.org/reports/>
- Transparency International. (2023). *Corruption Perception Index 2022*. Retrieved from Transparency International: <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>
- UN Security Council. (2011). *Resolution 2048*. Retrieved from UN Security Council: <https://www.un.org/securitycouncil/s/res/2048-%282012%29>
- United Nations (UN). (2024). *Humanitarian Needs and Response Plan 2024: South Sudan*. 8, 9, 10, 13, 16 . Retrieved from United Nations (UN): <https://www.unocha.org/publications/report/south-sudan/south-sudan-humanitarian-needs-and-response-plan-2024-issued-november-2023>

- UNOCHA, U. H. (2022). *Funding constraints force UN to scale back human rights monitoring in South Sudan*. Retrieved from United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA): <https://www.unocha.org/south-sudan>
- UNOCHA, U. H. (2022). *South Sudan Humanitarian Situation Report No. 156*. Retrieved from United Nations Office For the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA): <https://www.unocha.org/south-sudan>
- UNOCHA, U. H. (2022, June 10). *UNOCHA Office in Yei, South Sudan, attacked and set ablaze*. Retrieved from United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA): <https://www.unocha.org/south-sudan>
- UNOCHA, U. H. (2024). *Southern and Eastern Africa (South Sudan)*. Retrieved from United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA): <https://www.unocha.org/south-sudan>
- UNOCHA, U. N. (2023, April 5). *Staff member killed in attack on OCHA convoy in Jonglei, South Sudan*. Retrieved from United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA): <https://www.unocha.org/south-sudan>